

Politik Dagang Nabi Muhammad: Visi, Komunitas dan Negara

Imam Nawawi

Universitas Syeikh Nawawi Banten

E-mail: imamnawawi@usnb.ac.id

Marsus

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail: marsus@staff.uimsaid.ac.id

Abstract: *The success of Islam during the lifetime of the Prophet Muhammad (peace be upon him) in expanding its territorial influence was not solely the result of military strength, nor of the transformation of arid regions into habitable and productive lands, as suggested by some scholars. Rather, this success stemmed from the effectiveness of the Prophet Muhammad's commercial vision in safeguarding strategic interests at the level of global trade, with military power functioning merely as a supporting factor. This qualitative study employs the historical method with a political approach. The theoretical framework draws on social conflict theories as developed by Karl Marx and Max Weber. The findings indicate, first, that the Prophet Muhammad possessed a strong commercial vision that enabled him to exert significant influence over the surrounding society. Second, he successfully mobilized Arab merchant communities and transformed them into Muslim merchants as a new social entity. Third, the Prophet Muhammad exercised his authority as the leader of the Medinan polity to dispatch military expeditions aimed at securing the commercial activities of Medinan entrepreneurs from external threats, particularly those posed by the Byzantine Empire.*

Key Words : *Politics, Trade, Prophet Muhammad.*

Abstrak: Keberhasilan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. dalam memperluas wilayah kekuasaannya bukan semata karena kekuatan militernya, atau karena keberhasilan mengubah wilayah gersang menjadi layak huni dan produktif, sebagaimana pandangan para peneliti. Keberhasilan Islam disebabkan kesuksesan visi dagang Nabi Muhammad Saw. dalam mempertahankan kepentingannya di level perdagangan global, dimana kekuatan militer hanya faktor pendukung semata. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode sejarah, dengan pendekatan politik. Teori yang digunakan adalah teori konflik sosial dari Karl Marx dan Max Weber. Temuan penelitian menunjukkan; pertama, Nabi Muhammad Saw. memiliki visi dagang yang kuat, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Kedua, Nabi Muhammad Saw. berhasil memobilisir masyarakat pedagang Arab, dan mengubahnya menjadi pedagang muslim sebagai entitas sosial baru. Ketiga, Nabi Muhammad Saw. menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin Negara Madinah untuk mengirim ekspedisi militer yang bertujuan mengamankan usaha perdagangan pengusaha Madinah dari segala ancaman kekuatan asing, terutama dari Kekaisaran Bizantium.

Kata Kunci : *Politik, Dagang, Nabi Muhammad.*

Pendahuluan

Pada abad ketujuh Masehi, Islam berkembang dan menyebar dengan sangat cepat, melampaui batas-batas geografis Jazirah Arabia dan menjangkau wilayah-wilayah strategis di Timur Tengah, Asia Barat dan Tengah, Afrika Utara, hingga kawasan Mediterania. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, umat Islam berhasil membangun jaringan kekuasaan yang luas dan terintegrasi. Keberhasilan ekspansi ini sering dijelaskan melalui kombinasi beberapa faktor utama, antara lain kekuatan militer yang efektif, strategi politik yang adaptif dan cerdik, serta daya dorong ideologis-keagamaan yang kuat. Namun, reduksi keberhasilan Islam semata-mata pada faktor militer atau religius akan mengabaikan konteks ekonomi-politik global yang melatarbelakangi runtuhnya dominasi kekuatan-kekuatan lama.

Philip K. Hitti mencatat bahwa fase penaklukan, ekspansi, dan kolonisasi Islam secara sistematis baru dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada tahun 632 M, ketika otoritas politik berpindah ke tangan para khalifah ortodoks (*al-khulafā' al-rāsyidūn*), yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada periode inilah Islam tidak lagi sekadar komunitas religius, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan politik yang mampu mengorganisasi wilayah, mengelola sumber daya, dan mengatur relasi internasional. Keberhasilan militer Islam, menurut Hitti, tidak dapat dilepaskan dari kondisi krisis ekonomi dan politik yang tengah melanda dua kekaisaran besar yang saling berkonflik, yakni Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasanian. Perang panjang yang melelahkan antara kedua kekuatan ini telah menguras kas negara, melemahkan struktur militer, dan memicu kenaikan pajak yang membebani rakyat.¹

Situasi Bizantium pasca-Perang Mu'tah pada tahun 629 M menjadi contoh konkret dari krisis tersebut. Setelah berhadapan dengan pasukan Islam yang dikirim Nabi Muhammad Saw. dari Madinah, Bizantium mengalami tekanan finansial yang semakin berat. Kaisar Heraklius terpaksa menghentikan pemberian subsidi kepada suku-suku Syiria-Arab yang selama ini berfungsi sebagai buffer zone dan pasukan pendukung di wilayah sekitar Laut Mati serta sepanjang jalur strategis Madinah-Ghazzah. Kebijakan ini berdampak langsung pada melemahnya loyalitas suku-suku Arab tersebut terhadap Bizantium. Pada saat yang sama, pasukan Islam justru banyak direkrut dari kalangan suku-suku Badui pedalaman yang secara ekonomi relatif miskin dan terpinggirkan. Bagi kelompok ini, ekspansi Islam menawarkan dua jenis insentif sekaligus: insentif spiritual berupa janji surga bagi mereka yang gugur di medan perang, dan insentif material berupa akses terhadap tanah-tanah subur dan sumber daya ekonomi yang lebih produktif.² Dengan demikian, ekspansi Islam dapat dipahami sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi regional yang telah berlangsung lama.

¹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present* (Hampshire and London: Macmillan Education Ltd, 1970), p. 143-144

² Philip K. Hitti, *History of the Arabs....*, pp. 14-16.

Pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh Fairchild Ruggles. Ruggles menekankan bahwa keberhasilan penyebaran Islam yang begitu cepat lebih disebabkan oleh kemampuan umat Muslim dalam beradaptasi dengan lingkungan alam dan sistem produksi. Menurutnya, umat Islam mampu memanfaatkan sistem perairan alami, memahami bentang alam yang luas dan beragam, serta mengembangkan produksi varietas tanaman yang berlimpah. Melalui adopsi dan pengembangan teknologi irigasi, teknik pertanian, dan pengelolaan lanskap, wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang semula dikenal kering dan tandus—mulai dari Iran hingga Maghrib (Spanyol dan Maroko)—berubah menjadi kawasan yang jauh lebih layak huni dan produktif. Transformasi ekologis ini, menurut Ruggles, merupakan fondasi material yang memungkinkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi wilayah Islam awal.³

Namun demikian, pendekatan Ruggles cenderung mengabaikan dimensi geopolitik dari penguasaan bahan mentah dan jalur perdagangan utama. Jeanna Lee menegaskan bahwa penguasaan terhadap bahan mentah strategis—seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan produk agrikultur unggulan—dapat menjadikan suatu bangsa atau negara sebagai aktor dominan dalam jaringan global di sekitarnya, baik dalam bidang ekonomi, diplomasi, maupun politik. Dalam konteks Eurasia kuno, kendali kebudayaan dan ekonomi global dipegang oleh dua kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Bizantium di Barat dan Kekaisaran Tiongkok (Dinasti Han dan penerusnya) di Timur. Hubungan antara dua kekaisaran ini berlangsung sangat lama, sejak sekitar 130 SM hingga jatuhnya Konstantinopel pada 1453 M, terutama melalui perdagangan lintas Jalur Sutra.⁴

Sejarah Jalur Sutra sendiri bersifat sangat dinamis dan penuh konflik. Persaingan antar-kekaisaran untuk menguasai bahan mentah strategis dan jalur distribusi kerap berujung pada perang, embargo, hingga praktik spionase industri lintas negara. Dalam konteks inilah, perdagangan dan konflik menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jack Hirshleifer secara tajam menyatakan bahwa terdapat dua cara utama manusia untuk bertahan hidup: melalui produksi dan pertukaran (*production and exchange*), atau melalui predasi dan konflik (*predation and conflict*).⁵ Seperti halnya Bizantium dan Tiongkok, Muslim Arab juga menempuh kedua cara tersebut secara bersamaan.

Sejak abad ketujuh hingga abad ketiga belas, Muslim Arab dan Persia aktif melakukan perjalanan dan perdagangan ke Kekaisaran Tiongkok, baik melalui jalur darat Jalur Sutra maupun jalur laut Samudra Hindia. Para pedagang, pelancong, dan utusan Muslim memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional dan

³ D. Fairchild Ruggles, *Islamic Environments: Water, Land, Plants, and Society* (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), p. 1-22.

⁴ Jeanna Lee, "The Weight of Silk: An Exploratory Account into the Developing Relations between Byzantium and China," *History in the Making*, Vol. 14, Issue 1, article 4, (2021), p. 1-25.

⁵ Jack Hirshleifer, *The Dark Side of the Force: Economic Foundations of Conflict Theory* (Camrbidge, UK : The Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001), p. 1-5.

turut meramaikan kota-kota besar di Tiongkok. Mereka dikenal sebagai kelompok kosmopolitan, berpendidikan, dan memiliki etos niaga yang kuat. Sifat petualang dan keterbukaan budaya ini menjadikan komunitas Muslim sebagai unsur asing yang relatif dihormati dalam masyarakat Tiongkok. Keberadaan dan aktivitas mereka bahkan diabadikan dalam berbagai sumber sejarah Tiongkok.⁶

Di sisi lain, bangsa Arab Muslim juga menjalin hubungan dagang yang intensif dengan Kekaisaran Bizantium. Dalam konteks ini, umat Islam tampil sebagai “pendatang baru” dalam jaringan perdagangan Mediterania. Angeliki E. Laiou mencatat sejumlah kota Bizantium yang menjadi simpul perdagangan penting antara Muslim Arab dan Bizantium. Kota-kota seperti Trebizond dan Theodosiopolis (Erzurum) berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara Bizantium dengan wilayah Kaukasia dan Armenia yang telah berada di bawah pengaruh Islam. Attaleia menjadi pusat perdagangan maritim yang mempertemukan pedagang Muslim dari Siprus dan Syria dengan wilayah-wilayah seperti Sisilia, Antiochia, dan Aleppo. Aktivitas perdagangan ini berlangsung sangat dinamis sejak abad ketujuh hingga kedua belas, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah.⁷

Dengan demikian, kemunculan Islam pada abad ketujuh tidak dapat dipahami secara terisolasi dari arus besar perdagangan dan konflik global yang dimonopoli oleh tiga kekaisaran utama kala itu: Bizantium, Persia, dan Tiongkok. Sebagai aktor baru, umat Islam tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mewarnai dan membentuk ulang dinamika perdagangan internasional. Para pengusaha Muslim awal menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap sistem ekonomi global, sekaligus memanfaatkan celah-celah politik akibat melemahnya kekuatan-kekuatan lama.

Pada periode *nubuwah* dan *risalah* (610–632 M), Nabi Muhammad Saw. memainkan peran kunci dalam proses ini. Beliau tidak hanya memobilisasi massa atas dasar iman, tetapi juga membentuk komunitas pedagang Muslim yang solid, beretika, dan saling melindungi. Lebih dari itu, Nabi Muhammad Saw. mendirikan sebuah negara berdaulat di Madinah yang berfungsi sebagai instrumen politik untuk melindungi kepentingan ekonomi umat. Negara Madinah menjadi basis institusional bagi pengamanan jalur perdagangan, perlindungan kafilah, dan pengelolaan konflik dengan kekuatan eksternal.

Penelitian ini akan mengeksplorasi perdagangan dan konflik sebagai dua strategi utama umat Muslim untuk bertahan hidup dan berkembang pada paruh pertama abad ketujuh. Fokus utama penelitian adalah menjawab bagaimana visi kenabian Nabi Muhammad Saw. tentang perdagangan, pembentukan komunitas pedagang Muslim,

⁶ Aditya Pratama Widodo, “In the Middle Kingdom: A Historical Survey on the Arabs and Persians’ Ventures in China, 600s–1300s,” *IIUM: Journal of Religion and Civilisational Studies*, Vol. 7, Issue 1 (2024), p. 4-20.

⁷ Koray Durak, “The economy of Melitene/Malatya and its role in the Byzantine-Islamic trade (seventh to eleventh centuries),” *Byzantinische Zeitschrift*, Vol. 115, Issue 3 (2022), p. 829-874.

dan pendirian negara independen baru berperan sebagai fondasi politik-ekonomi yang memungkinkan Islam bertahan, berkembang, dan akhirnya tampil sebagai kekuatan global baru.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode sejarah sebagai kerangka utama untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam politik dagang Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat ra., yang berpijak pada visi kenabian dan realitas sosio-politik abad ketujuh Masehi. Metode sejarah dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri peristiwa, aktor, struktur, serta dinamika ekonomi-politik secara kronologis dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, politik dagang Nabi Muhammad Saw. tidak dipahami sebagai kebijakan yang lahir secara ahistoris, melainkan sebagai respons strategis terhadap kondisi perdagangan regional, relasi kekuasaan antarwilayah, serta tekanan politik dan ekonomi yang dihadapi komunitas Muslim awal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Victor Wiseman.⁸ Pendekatan ini memandang aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, sebagai bagian integral dari praktik kekuasaan, pembentukan negara, dan pengelolaan keamanan. Melalui pendekatan politik, visi dagang Nabi Muhammad Saw. dianalisis sebagai fondasi bagi pembentukan komunitas pedagang Muslim di Madinah yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik. Para pedagang Muslim Madinah terlibat aktif dalam proses pengumpulan informasi strategis, pemetaan jalur perdagangan, serta deteksi dini terhadap ancaman yang berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan Negara Madinah. Dengan demikian, perdagangan tidak berdiri terpisah dari politik, melainkan menjadi instrumen penting dalam konsolidasi kekuasaan dan pertahanan negara.

Pendekatan politik ini juga digunakan untuk menjelaskan kebijakan Negara Madinah dalam mengutus ekspedisi militer guna melindungi kafilah dagang Muslim ketika melakukan aktivitas niaga di luar wilayah Madinah. Ekspedisi tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai agresi militer, melainkan sebagai upaya proteksi terhadap hak ekonomi warga negara dan penegakan kedaulatan politik. Dalam konteks ini, politik dagang Nabi Muhammad Saw. menunjukkan keterpaduan antara visi ekonomi, strategi politik, dan kebijakan keamanan, yang seluruhnya berakar pada prinsip kenabian tentang keadilan dan perlindungan terhadap komunitas.

⁸ Herbert Victor Wiseman, *Political Systems: Some Sociological Approaches* (London: Routledge, 2024), 21-30.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua teori konflik sosial sebagai pisau analisis, yakni teori konflik sosial Karl Marx dan teori konflik sosial Max Weber. Teori konflik sosial Karl Marx digunakan untuk memahami dinamika ketimpangan ekonomi dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi konflik antara komunitas pedagang Muslim Madinah dan kekuatan politik-ekonomi di sekitarnya. Dalam pandangan Marx, masyarakat senantiasa berada dalam kondisi konflik karena adanya persaingan atas sumber daya yang terbatas, seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Ketimpangan struktural antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai melahirkan eksplorasi ekonomi, yang pada gilirannya memicu konflik dan perubahan sosial.⁹

Dalam konteks sejarah Nabi Muhammad Saw., konflik sosial ini tampak jelas ketika para pedagang Muslim Madinah mengalami gangguan, intimidasi, dan pembatasan akses perdagangan menuju wilayah Syam, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Pembatasan ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan antara komunitas Muslim yang sedang tumbuh dan kekuatan imperium besar yang mengontrol jalur perdagangan regional. Dengan menggunakan teori konflik Marxian, konflik tersebut dapat dipahami sebagai benturan kepentingan ekonomi antara dua entitas politik yang memiliki posisi struktural berbeda dalam sistem perdagangan internasional.

Sementara itu, teori konflik sosial Max Weber digunakan untuk melengkapi analisis dengan menekankan dimensi ideologis dan religius dari konflik. Weber memandang konflik sosial tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan visi ideal, nilai, dan keyakinan keagamaan.¹⁰ Dalam kerangka ini, konflik antara para pedagang Muslim Madinah dan penguasa Bizantium tidak hanya bersifat ekonomis atau politis, tetapi juga ideologis-religius. Nabi Muhammad Saw. bukan hanya pemimpin politik dan militer, tetapi juga pembawa risalah agama baru yang menantang tatanan nilai dan legitimasi kekuasaan lama.

Aktivitas ekonomi dan politik Nabi Muhammad Saw. tidak dapat dipisahkan dari keyakinan religius yang melandasinya. Perperangan antara pasukan Madinah dan pasukan Bizantium tidak sekadar dipahami sebagai upaya mempertahankan kepentingan ekonomi dan kedaulatan politik, tetapi juga sebagai manifestasi konflik ideologis yang dalam terminologi Islam dipahami sebagai jihad *fi sabīlillāh*. Dengan memadukan teori konflik Karl Marx dan Max Weber, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang komprehensif, yang mampu menjelaskan politik dagang

⁹ İdris Güçlü, "Karl Marx and Ralf Dahrendorf: A comparative perspective on class formation and conflict," *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, Vol. 9, Issue2 (2014), p. 151-168.

¹⁰ Winston Davis, "Max Weber on Religion and Political Responsibility," *Religion*, Vol. 29, Issue 1 (1999), p. 29-60.

Nabi Muhammad Saw. sebagai fenomena historis yang kompleks, multidimensional, dan sarat dengan makna ekonomi, politik, serta religius.

Pembahasan

Visi Dagang Nabi Muhammad Saw

Visi bisnis Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya berakar pada gagasan perdagangan yang beretika, berintegritas, menjaga amanah, serta bertanggung jawab secara sosial. Perdagangan dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk akumulasi keuntungan material, melainkan sebagai bagian dari praktik moral dan ibadah sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai utama yang membentuk etos komersial Islam meliputi kejujuran (*sidq*), keadilan ('*adl*), pemenuhan akad (*wafā' al- 'uqūd*), larangan penipuan (*gharar* dan *tadlīs*), serta penekanan pada kemaslahatan umum (*maṣlahah*). Nilai-nilai ini tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi diterapkan secara aktif dan konkret dalam praktik pasar, jaringan perdagangan, dan relasi bisnis lintas wilayah.

Dampak sosial-ekonomi dari praktik perdagangan di bawah bimbingan Nabi Muhammad Saw. terlihat pada terbentuknya sistem pasar yang relatif adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Praktik monopoli dilarang, eksploitasi ekonomi ditekan, dan distribusi kekayaan diupayakan agar tidak terpusat pada segelintir elite. Prinsip kedermawanan institusional melalui zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme korektif atas ketimpangan ekonomi. Keberhasilan visi tersebut tercermin dalam perilaku bisnis para sahabat utama, seperti Abu Bakar al-Šiddīq, Utsman bin 'Affan, dan Abdurrahman bin 'Auf, yang mampu menyeimbangkan antara pencapaian kekayaan pribadi dan komitmen kuat terhadap etika Islam. Kekayaan tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan kemaslahatan umat.¹¹

Perdagangan beretika yang dikembangkan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya sekaligus dapat dibaca sebagai respons kritis terhadap krisis etis perdagangan global pada masa itu. Salah satu aspek paling problematik dari sistem ekonomi global pra-Islam adalah perbudakan. Sejak awal abad keempat, terutama setelah etos Kristen mulai memengaruhi hukum Kekaisaran Romawi, praktik perbudakan justru mengalami institusionalisasi yang semakin mapan. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi menjadi bagian Barat dan Timur pada tahun 395 M, dan terlebih setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium) mempertahankan klasifikasi sosial yang tegas antara manusia merdeka dan manusia budak. Status budak dilembagakan dalam hukum,

¹¹ Mufti Mohammad Talha Azhar, "Prophet (SAW) and Sahaba's Business Life," *Contemporary Journal of Social Science Review*, Vol. 3, Issue 2 (2025), p. 89-105.

ekonomi, dan struktur sosial, sehingga menjadi bagian integral dari sistem produksi dan perdagangan.

Pada abad ketujuh dan kedelapan, ekspansi kekuasaan Arab-Muslim membawa perubahan signifikan pada wilayah-wilayah luas, termasuk Semenanjung Iberia, Afrika Utara, sebagian besar wilayah Bizantium di Timur Dekat, serta seluruh kawasan bekas Kekaisaran Sasanian Persia. Sejak periode inilah, sistem perbudakan mengalami transformasi penting, meskipun sebagian sejarawan mencatat adanya kesinambungan tertentu dalam praktiknya.¹² Namun demikian, perubahan mendasar terletak pada kerangka normatif dan hukum yang dibangun Islam dalam memandang manusia dan relasi ekonomi.

Ketika Islam muncul pada abad ketujuh, perbudakan merupakan fenomena global yang tidak hanya ditemukan di Romawi dan Bizantium, tetapi juga dalam jaringan perdagangan yang dikuasai bangsa Yunani serta kerajaan-kerajaan Yahudi, seperti Kerajaan Himyar di Yaman. Dalam tradisi keagamaan Kristen dan Yahudi, perbudakan tidak pernah secara eksplisit dikutuk sebagai sistem yang bertentangan dengan prinsip moral. Islam, sebaliknya, menghadirkan perspektif yang berbeda secara gradual dan struktural. Islam memerintahkan para jenderal militer untuk memberikan pilihan kepada tawanan perang, yakni dibebaskan secara cuma-cuma atau ditebus sebagai jalan menuju kebebasan, bukan dijadikan komoditas ekonomi semata.¹³

Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya memang tidak menghapus perbudakan secara instan, tetapi membangun kerangka hukum dan moral yang secara sistematis mendorong penghapusan praktik tersebut. Salah satu instrumen penting adalah *mukātabah*, yaitu perjanjian kontraktual yang memungkinkan budak menebus kebebasannya melalui mekanisme kerja dan pembayaran bertahap.¹⁴ Pada masa kekhilifahan Umar bin Khattab, bahkan mulai dirintis prototipe institusi pembebasan budak yang melibatkan negara. Dalam beberapa kasus, biaya pembebasan budak diambil dari kas negara (Baitul Mal), sementara dalam kasus lain pembebasan dilakukan secara bersyarat dengan kewajiban pengabdian terbatas kepada negara Islam.¹⁵ Praktik ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan publik yang menjadikan pembebasan manusia sebagai tujuan etis ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan perdagangan yang adil dan beretika, Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya juga menolak praktik monopolis. Dalam Islam, penguasaan pasar yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan. Nabi Muhammad

¹² Jelle Bruning & Said Reza Huseini, "Slavery in Byzantium and the Medieval Islamicate World: Texts and Contexts," *Slavery & Abolition*, Vol. 44, Issue 4 (2023), p. 583-592.

¹³ Yvonne Ridley, *The Rise of the Prophet Muhammad: Don't Shoot the Messenger* (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019), p. 40-44.

¹⁴ Ulrike Mitter, "Unconditional Manumission of Slaves in EARLY ISLAMIC LAW: a Hadith Analysis," *Der Islam*, Vol. 78, Issue 1 (2001), p. 35-72.

¹⁵ عبد السلام بن محسن آل عيسى، دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه، رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Saw. secara tegas melarang penimbunan barang dan pengendalian suplai demi keuntungan sepihak. Larangan ini tercermin dalam puluhan hadis yang diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis utama, seperti Shahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Sunan al-Darimi. Hadis-hadis tersebut mengajarkan bahwa harta yang telah ditunaikan zakatnya tidak termasuk harta yang ditimbun (*kanz*), melarang transaksi di atas transaksi orang lain, serta mengharamkan penimbunan barang kebutuhan pokok.¹⁶

Larangan monopoli dalam Islam menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas ekonomi global pra-Islam. Pada masa itu, Kekaisaran Persia menguasai jalur sutra dan memonopoli perdagangan barang-barang dari China menuju Bizantium. Akibatnya, harga barang melambung tinggi dan akses perdagangan menjadi sangat terbatas. Pajak tinggi yang diberlakukan Persia terhadap barang-barang China yang masuk ke wilayah Bizantium memperparah ketimpangan ekonomi dan mempersempit ruang persaingan. Upaya Kaisar Bizantium Justinian (527–565 M) untuk membuka jalur alternatif melalui Crimea pun gagal, karena resistensi Persia dan pedagang-pedagangnya. Bahkan, dalam sistem Bizantium sendiri dikenal jabatan Comes Commerciorum, pejabat yang memonopoli perdagangan sutra China dan menjadi satu-satunya pihak yang diberi izin berbisnis lintas kekaisaran.¹⁷

Berbeda secara fundamental dengan praktik tersebut, Islam tidak menganjurkan intervensi koersif dalam mekanisme pasar, baik oleh negara maupun individu, selama proses jual beli berlangsung secara adil. Penentuan harga diserahkan pada dinamika pasar yang sehat, tanpa penimbunan, manipulasi informasi, atau sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan saling ridha dalam transaksi. Komunitas pedagang Madinah diarahkan untuk menjaga persaingan yang wajar dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan pihak lain melalui monopoli atau kolusi. Dengan demikian, perdagangan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial yang adil dan beradab.¹⁸

Komunitas Pedagang Madinah

Umat Muslim pada masa Nabi Muhammad Saw. pada dasarnya adalah komunitas pedagang. Struktur sosial dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam sangat bergantung pada aktivitas niaga, baik perdagangan lokal antar-kabilah maupun

¹⁶ Nurhadi, "The Tube Hadis Study About Monopoly In Business Economy," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, Vol. 2, Issue 4 (2018), p. 1-17.

¹⁷ Nicolas Oikonomides, "Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkarioi," *Dumbarton Oaks Papers*, Vol. 40, (1986), p. 33-53.

¹⁸ Muhammad Awais, "10. Understanding Market Structure in Islamic Framework," in Muhammad Awais, Ali Osman Öztürk, Omar Khalid Bhatti, and Nazima Ellahi (eds.), *The Islamic Economic System: Cultural Context in a Global Economy* (London: Routledge, 2024), p. 131-144.

perdagangan jarak jauh lintas wilayah dan kekaisaran. Kota Makkah, tempat Nabi Muhammad Saw. dilahirkan dan diutus sebagai Rasul, merupakan simpul penting jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syam dan wilayah Bizantium di utara. Dalam konteks inilah Islam lahir dan berkembang, bukan di tengah masyarakat agraris atau birokratis, melainkan dalam kultur niaga yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat utamanya memiliki pengalaman luas dalam dunia perdagangan dan menjalankan bisnis berskala global.

Nabi Muhammad Saw. sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul telah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (*al-Amīn*). Demikian pula para sahabat terdekatnya, yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang. Salah satu figur paling menonjol dalam hal ini adalah Abu Bakar as-Šiddīq. Ketika Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu pertama pada tahun 610 M, Abu Bakar telah mapan secara ekonomi dan memiliki kekayaan sekitar 40.000 dirham. Angka ini menunjukkan bahwa Abu Bakar bukan sekadar pedagang kecil, melainkan pelaku bisnis yang sukses dan memiliki modal besar dalam jaringan perdagangan Arab.

Namun, setelah memeluk Islam, orientasi ekonomi Abu Bakar mengalami transformasi signifikan. Kekayaannya tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana perjuangan moral dan kemanusiaan. Ia menggunakan sebagian besar hartanya untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Akibatnya, ketika Abu Bakar melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, harta yang tersisa hanya sekitar 5.000 dirham. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa dalam etos bisnis Islam awal, kepemilikan modal tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, Abu Bakar tidak meninggalkan dunia perdagangan. Di Madinah, ia tetap dikenal sebagai pedagang aktif dan produktif. Nabi Muhammad Saw. tidak pernah melarang kecintaan Abu Bakar terhadap aktivitas bisnis, bahkan membiarkannya terus berdagang selama tidak bertentangan dengan prinsip etika Islam. Fakta ini penting, karena menunjukkan bahwa Islam tidak memusuhi aktivitas ekonomi, melainkan mengarahkannya. Bahkan, satu tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada tahun 632 M, Abu Bakar masih tercatat melakukan perjalanan dagang ke kota Bostra (Arab: *Busrā*), sebuah kota penting di wilayah Syam.¹⁹

Bostra sendiri merupakan kota strategis di wilayah Semenanjung Arabia yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, setelah penaklukan Kerajaan Nabataean pada tahun 105/106 M. Bizantium membagi Provinsi Arabia ke dalam tiga wilayah administratif utama, yakni *Arabia Petraea*, *Arabia Deserta*, dan *Arabia Felix*. *Arabia Petraea*, yang membentang dari wilayah Syam hingga Teluk ‘Aqaba, memiliki peran vital sebagai jalur perdagangan utama dari Hadramaut dan Yaman menuju Syam

¹⁹ محمد عبد الحفيظ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي, التراطيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتأخر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلمية, دار الأرقام - بيروت, الطبعة الثانية. ١٤٣١

dan Mesir. *Arabia Felix* (Yaman) dikenal sebagai pusat produksi dan distribusi berbagai komoditas bernilai tinggi seperti rempah-rempah dan wewangian. Sementara itu, *Arabia Deserta*—dengan Bostra sebagai pusatnya—pada awalnya kurang mendapatkan perhatian Bizantium, tetapi tetap menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan regional.²⁰ Keterlibatan Abu Bakar dalam perdagangan hingga ke wilayah Bizantium menunjukkan keterhubungan umat Islam awal dengan ekonomi global.

Tidak hanya ke Bostra, Abu Bakar juga aktif berdagang ke berbagai pasar di Suriah dan Basrah, Irak. Sebelum era Islam, Basrah telah dikenal sebagai pusat perdagangan maritim dan darat karena letaknya yang strategis di dekat Teluk Arab. Kota ini sebelumnya dikenal dengan nama Tridon atau al-Ubulla, sebuah pelabuhan besar yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa dan wilayah, seperti Yaman, Habsyah, dan Hijaz.²¹ Abu Bakar dikenal sebagai pedagang kain yang sukses, melakukan transaksi lintas wilayah dengan nilai ribuan dirham, sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra-mitra dagangnya.

Salah satu episode paling terkenal dalam kehidupan ekonomi Abu Bakar adalah peristiwa musim paceklik di Madinah. Ketika itu, Abu Bakar baru kembali dari perjalanan dagang di Syam dengan membawa seribu unta penuh muatan barang. Situasi krisis membuat banyak pedagang Madinah berusaha membeli barang-barang Abu Bakar dengan harga tinggi untuk ditimbun atau dijual kembali demi keuntungan besar. Namun, Abu Bakar menolak seluruh tawaran tersebut. Ia justru memilih membagikan seluruh barang dagangannya—termasuk unta-untanya—kepada kaum miskin dan mereka yang terdampak krisis.²² Tindakan ini mencerminkan puncak integrasi antara etika, spiritualitas, dan praktik ekonomi dalam Islam. Usaha dagang Abu Bakar terus berlangsung hingga ia diangkat menjadi Khalifah, bahkan pada masa awal kekhalifahannya ia belum menerima gaji dari negara.²³

Selain Abu Bakar, figur penting dalam sejarah perdagangan Islam awal adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin sekaligus istri Nabi Muhammad Saw. Khadijah dikenal sebagai pengusaha perempuan yang kaya raya dan memiliki jaringan perdagangan luas hingga ke Syam. Ia mengelola usahanya dengan sistem mudhārabah, yakni kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Khadijah mempekerjakan banyak pegawai laki-laki dan dikenal adil serta profesional dalam membagi keuntungan.

²⁰ Ataullah Bogdan Kopanski, "The Nazarean Legacy: Religious Conflict in Pre-Islamic Arabia as Seen through Crew-Roman Eyes," *American Journal of Islam and Society*, Vol. 15, Issue 2 (1998), p. 1-24.

²¹ سيد محمد السيد, البصرة ذات الوشاحين (التاريخ والسياسة والثقافة), القاهرة: مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع, 2006.

²² Kalsoom Paracha and Iqra Arif, "An Overview of the Islamic Trade System and its Various Types," *Annals of Social Sciences and Perspective*, Vol. 6, Issue 2 (2025), p. 129-147.

²³ Baker Ahmad Alserhan, *The Principles of Islamic Marketing* (New York: Routledge, 2017), p. 50-55.

Dalam salah satu ekspedisi dagang, Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad Saw. untuk memimpin perjalanan ke Bostra, ditemani oleh Maysarah, salah satu pelayan Khadijah. Sebelum keberangkatan, Khadijah menjanjikan imbalan yang lebih besar daripada yang biasa ia berikan kepada para pedagang Quraisy lainnya. Nabi Muhammad Saw. menerima tawaran tersebut dan menjalankan misi dagang dengan penuh integritas. Di Bostra, beliau berhasil menjual barang-barang dari Makkah dan membeli komoditas baru dengan keuntungan yang signifikan. Sepulang ke Makkah, keuntungan yang diperoleh jauh melampaui ekspedisi dagang sebelumnya, sehingga Khadijah pun melipatgandakan upah beliau.²⁴ Kisah ini tidak hanya menegaskan kapasitas Nabi Muhammad Saw. sebagai pedagang ulung, tetapi juga memperlihatkan praktik bisnis yang berbasis kepercayaan dan profesionalisme.

Sahabat lain yang tak kalah penting adalah Umar bin Khattab. Sebelum dan sesudah memeluk Islam, Umar tetap menjalankan profesinya sebagai pedagang. Bahkan setelah hijrah, ia masih berdagang hingga kemudian diangkat menjadi pejabat negara dan memperoleh gaji resmi. Setelah menerima gaji, Umar memilih meninggalkan dunia perdagangan untuk menghindari konflik kepentingan.²⁵ Namun, tradisi niaga tetap berlanjut dalam keluarganya. Kedua putranya, Abdullah dan Ubaidillah, tetap menjalankan usaha dagang meskipun ayah mereka menjabat sebagai Khalifah.

Salah satu peristiwa penting yang menggambarkan ketegasan etika ekonomi Umar bin Khattab adalah konflik antara dirinya dengan kedua putranya. Dikisahkan bahwa Gubernur Bashrah, Abu Musa al-Asy'ari, menyerahkan sejumlah dana dari Baitul Mal kepada Abdullah dan Ubaidillah untuk dikelola dalam perdagangan. Setelah usaha tersebut menghasilkan keuntungan dan zakatnya dikeluarkan, Umar memerintahkan agar seluruh sisa keuntungan dikembalikan ke kas negara. Kedua putranya merasa keberatan dan mengadu kepada Abu Musa. Abu Musa kemudian memutuskan jalan tengah: separuh keuntungan diberikan kepada Abdullah dan Ubaidillah sebagai hasil kerja mereka, sementara separuh lainnya diserahkan kepada Umar untuk disimpan di Baitul Mal. Kisah ini menegaskan bahwa dalam praktik ekonomi Islam awal, tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan fasilitas negara, bahkan oleh keluarga penguasa.²⁶

Dengan demikian, praktik perdagangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya menunjukkan bahwa Islam sejak awal berkembang dalam tradisi ekonomi yang aktif, global, dan berjejaring luas, namun tetap dikendalikan oleh prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

²⁴ Benedikt Koehler, *Early Islam and the Birth of Capitalism* (Maryland: Lexington Books, 2014), 31.

²⁵ Shibli Nu'mānī, *Omar the Great: The Second Caliph of Islam*, Volume 2 (Lahore: Sh. M. Ashraf, 1962), p. 215.

²⁶ S. M. Hasanuz Zaman, *Trade in Islam: Principles and Practices*, (India: Umma Publishing House, 1970), p. 26.

Kebijakan Perang Madinah

Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad Saw. tidak saja membangun komunitas pedagang untuk memperkuat basis ekonomi, tetapi juga menciptakan sebuah negara yang berdaulat, *madīnah munawwarah*. Negara Madinah menjadi modal baru untuk memperlancar kepentingan bisnis yang sudah berjalan. Namun, kafilah dagang Muslim Madinah mulai mendapat gangguan di Daumatul Jandal. Akhirnya, Nabi Muhammad Saw. merespon dengan melakukan serangan ke Daumatul Jandal pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 5 H. Pertempuran tidak sempat meletus. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. kembali lagi ke Madinah sebelum tiba di Daumataul Jandal.²⁷ Nabi Muhammad Saw. tidak memasuki Daumatul Jandal dan memilih berhenti di pinggiran Syam karena tidak ingin menimbulkan kekhawatiran berlebihan dari Kekaisaran Bizantium.²⁸

Sebelum ekspedisi ke Daumatul Jandal dilakukan, Nabi Muhammad Saw. menerima informasi bahwa pasukan musuh di Daumatul Jandal tidak hanya mengganggu kafilah dagang Arab melainkan juga tengah bersiap menyerang Negara Madinah yang berdaulat. Nabi Muhammad Saw. merespon rencana penyerangan Negara Madinah dengan menyiapkan pasukan muslim sebanyak 1,000 orang. Sepanjang perjalanan menuju Daumatul Jandal, pasukan Muslim menggempur para penggembala mereka hingga kocar-kacir. Kabar kedatangan pasukan Muslim sampai lebih awal ke telinga orang-orang di Daumatul Jandal, sehingga mereka melarikan diri satu hari sebelumnya.²⁹

Setibanya di Daumatul Jandal, pasukan Muslim tidak menemukan satu orang pun tersisa. Pasukan muslim menyebar untuk memeriksa keadaan. Semua orang melapor bahwa mereka tidak berhasil menemukan siapapun, kecuali seorang prajurit yang bernama Muhammad bin Maslamah. Ibnu Maslamah berhasil menangkap satu orang penduduk Daumatul Jandal, dan dari keterangannya diketahui bahwa penduduk kota sudah melarikan diri sejak kemarin sore.³⁰

Ekspedisi ke Daumatul Jandal dianggap awal inisiasi Nabi Muhammad Saw. melakukan kontak militer dengan Kekaisaran Bizantium.³¹ Nabi Muhammad saw. tidak berhadap-hadapan lagi dengan Bizantium sampai 3 tahun ke depan. Perang melawan Bizantium baru terjadi pada 8 H., ketika Perang Dzatu Athlah pecah. Dalam perang

²⁷ 'Alī Muḥammad Muḥammad Ṣallābī, *The Noble Life of the Prophet*, Volume 3 (Riyad: Darussalam, 2005), p. 1464.

²⁸ Masudul Hasan, *History of Islam: Classical period, 571-1258 C.E* (Lahore: Islamic Publications, 1998), p. 77.

²⁹ ابن حبان, السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان, بيروت: المكتب الإسلامي, سنة 2000 ص 185
³⁰ أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدنى، الواقدى، تاريخ مدينة دمشق - بيروت: دار الفكر، 1995 ج 2 ص 27-3

³¹ غزوة شهاب احمد و مهدي عبد الحميد, "العلاقات بين دولة المدينة وبلاد الشام في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم" سرى من رأى, المجلد 9 العدد 34 سنة 2013 ص 251-269

tersebut, Nabi Muhammad Saw. mengutus Ka'ab bin 'Umair Al-Ghfari bersama 15 orang lainnya menuju Dzatu Athlah, wilayah pinggiran Syam. Namun, semua pasukan Muslim terbunuh kecuali Ka'ab yang berhasil melarikan diri ke Madinah dengan selamat.³²

Kekalahan dalam Perang Dzatu Athlah direspon pada bulan Jumadil Awwal di tahun yang sama. Nabi Muhammad Saw. mengirim pasukan Muslim ke wilayah Syam, di bawah komando Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Jumlah pasukan Muslim sebesar 3,000 orang. Mereka bermalam di Ma'an (Jordan). Sementara pasukan Bizantium berjumlah 100,000 orang, karena mendapat dukungan dari suku-suku Arab seperti Lakhm, Judzam, Al-Qain, Bahra', dan Bali. Mereka bermalam di Mab, wilayah Al-Balqa'. Kedua pasukan bertempur di desa Masyarif, perbatasan wilayah Al-Balqa'. Pasukan Muslim sempat menyingkir ke desa Mu'tah. Perang kembali pecah di desa Mu'tah ini.³³

Perang Mu'tah membawa kerugian besar bagi pihak Muslim, karena tiga komandan mereka Zaid, Ja'far dan Abdullah terbunuh. Kekalahan itu memberikan tekanan psikologis yang begitu berat bagi umat Muslim. Menurut Ibnu Hibban, pada tahun 9 H., satu tahun pasca perang, sahabat Umar bin Khatthab mengagumi kekuatan Bizantium dan Persia. Umar pun meminta Nabi Muhammad saw. agar berdoa kepada Allah dan memohon supaya umat Muslim diberikan kejayaan seperti Bizantium dan Persia. Nabi Muhammad Saw. menjawab agar Umar tidak perlu berkecil hati melihat Persia dan Bizantium sebagai umat yang mendapat kebahagiaan mereka hanya di dunia saja.

Pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 9 H., beberapa suku-suku Arab yang sebelumnya mendukung Bizantium selama Perang Mu'tah, seperti Bali dan Lakhm, datang menghadap Nabi Muhammad saw. di Madinah. Suku Bali mengutus satu orang bernama Ruwaifa' bin Tsabit Al-Baliwi. Sementara Suku Lakhm mengutus 10 orang, yaitu Hani' bin Habib, Al-Fakih bin Al-Nu'man, Hablah bin Malik, Abu Hind bin Bar, Al-Thayyib bin Bar, Tamim bin Aus, Na'im bin Aus, Yazid bin Qais, 'Urwah bin Malik, dan Murrah bin Malik. Suku Lakhm menghadiahkan minuman keras (*khamr*) kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw. menolaknya, tetapi suku Lakhm masih memaksa dengan mengatakan agar *khamr* itu dijual, kemudian uangnya digunakan Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad tetap menolak, dan mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan memakannya haram pula menjualnya.³⁴

Negosiasi suku-suku Arab dengan Nabi Muhammad Saw. tidak berhasil. Pertempuran melawan Bizantium untuk ketiga kalinya tidak terhindarkan. Menurut Al-Waqidi, para pedagang muslim yang baru tiba di Madinah dari Syam menyampaikan

³² ابن حبان, السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان, 165.

³³ F. E. Peters, *Muhammad and the Origins of Islam* (Albany, New York: State University of New York Press, 1994), p. 231.

³⁴ ممدوح جاد احمد, مختصر السرور في سيرة الرسول, 425 ص

kebab bahwa Kekaisaran Bizantium sedang mempersiapkan pasukan lebih besar untuk menyerang Madinah. Kaisar Heraklius mendanai perang untuk jangka waktu satu tahun lamanya, serta mengumpulkan bala bantuan dari suku-suku Arab seperti Lakhm, Judzam, Ghassan, dan 'Amilah untuk bersama-sama menggempur Madinah.

Mendengar pergerakan Bizantium, pada bulan Rajab 9 H., Nabi Muhammad Saw. memerintahkan umat muslim mempersiapkan diri untuk kembali berperang. Kali ini persiapan harus jauh lebih matang, karena sedang memasuki musim panas. Orang-orang kaya diperintahkan menyumbangkan harta mereka. Menurut Ibnu Ishaq, Utsman bin 'Affan adalah sahabat yang paling banyak dalam menyumbang. Menurut Al-Waqidi, Abu Bakar as-Shiddiq adalah sahabat yang pertama kali menyumbangkan seluruh hartanya sebesar 4.000 dirham. Umar bin Khatthab menyumbangkan separuh hartanya. Sedangkan Ustman bin 'Affan menanggung sepertiga seluruh kebutuhan tentara, sehingga sumbangannya menjadi yang terbesar. Total pasukan muslim berjumlah 30,000 orang.

Dalam perjalanan menuju wilayah Tabuk, banyak wilayah yang semula dikuasai Bizantium menyerahkan diri dan berdamai. Kota-kota tersebut antara lain Aylah, Adzrah, dan Jarba'. Pasukan Muslim menetap di Tabuk selama 10 hari, dan kemudian kembali ke Madinah. Saking beratnya beban pengaruh Perang Tabuk terhadap psikologi, sebagian umat muslim berkata bahwa tidak akan ada lagi jihad setelah Perang Tabuk ini. Namun, ucapan tersebut dibantah oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menyatakan bahwa jihad akan terus berlanjut hingga nanti Nabi Isa as. turun ke dunia.

Setibanya umat Muslim di Madinah, beberapa suku Arab yang semula berafiliasi dengan Bizantium memilih masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Muslim. Ibnu Ishaq menceritakan kisah keberislaman Farwah bin 'Amr bin Al-Nafirah dari suku Judzam. Farwah adalah seorang bawahan Bizantium yang tinggal di Ma'an, Syam, dan bertanggung jawab mengawasi orang-orang Arab di Ma'an dan sekitarnya. Farwah Al-Judzami mengutus seorang utusan menghadap Nabi Muhammad Saw. di Madinah, agar mengabarkan bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. Untuk menunjukkan ketulusannya, Farwah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad Saw. berupa Bighal putih. Pihak Bizantium mengetahui peristiwa itu. Farwah pun ditangkap dan dipenjarakan. Farwah dibunuh dengan cara disalib.

Selepas bulan Shafar 10 H., Nabi Muhammad Saw. mempersiapkan pasukan Muslim untuk kembali berperang melawan Bizantium di Syam. Nabi Muhammad Saw. mengutus Usamah bin Zaid bin Haritsah menuju wilayah Takhum. Nabi Muhammad Saw. juga meminta Usamah untuk memasuki wilayah Darum, Palestina. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad saw. mengirim dua orang utusan lain, yaitu Dahiyyah bin Khalifah Al-Kalbi dan Suja' bin Wahab al-Asadi. Dahiyyah diutus menghadap Kaisar Bizantium, Heraclius, sementara Suja' kepada Al-Harits bin Abi Syamr Al-Ghassani, penguasa Takhum, bawahan Bizantium. Satu tahun kemudian, sebelum Heraklius dan

Harits al-Ghassani masuk Islam, Nabi Muhammad Saw. wafat pada 12 Rabiul Awwal 11 H.

Kesimpulan

Tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak dapat dipahami secara sempit sebagai akibat kekuatan militer atau religiusitas normatif semata. Keberhasilan tersebut merupakan hasil integrasi antara visi dagang yang beretika, praktik ekonomi yang berkeadilan, serta kebijakan politik-militer yang rasional dan strategis. Sejak awal, Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat membangun sistem perdagangan yang berpijak pada nilai moral seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diterapkan secara konkret dalam pasar, jaringan niaga lintas wilayah, dan relasi ekonomi global.

Praktik perdagangan Islam awal tampil sebagai kritik struktural terhadap sistem ekonomi global pra-Islam yang ditandai oleh monopoli, eksplorasi, dan perbudakan. Islam memang tidak menghapus perbudakan secara revolusioner dan instan, tetapi membangun kerangka normatif, hukum, dan kebijakan publik yang secara gradual mendorong pembebasan manusia dan transformasi relasi produksi. Instrumen seperti mukātabah, pembebasan budak melalui Baitul Mal, serta larangan eksplorasi ekonomi menunjukkan bahwa orientasi perdagangan Islam melampaui sekadar akumulasi kapital dan diarahkan pada tujuan etis serta kemaslahatan sosial.

Komunitas pedagang Madinah—yang melibatkan Nabi Muhammad Saw., Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan para sahabat lainnya—menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi berskala global dapat berjalan selaras dengan komitmen spiritual dan keadilan sosial. Kekayaan tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas, membela kemanusiaan, dan menopang kepentingan umat. Dengan demikian, Islam sejak awal berkembang dalam kultur niaga global yang aktif dan berjejaring luas, namun tetap dikendalikan oleh prinsip etika.

Dalam konteks politik dan militer, kebijakan perang Nabi Muhammad Saw. terhadap Bizantium juga tidak berdiri sebagai ekspansi kekuasaan semata. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan jalur perdagangan, penjagaan kedaulatan negara Madinah, dan respons terhadap ancaman geopolitik eksternal. Peristiwa-peristiwa seperti Perang Mu'tah dan Tabuk menunjukkan bahwa kebijakan militer Islam awal memiliki dimensi ekonomi-strategis yang rasional, bukan agresi ideologis semata. Dengan demikian, perdagangan, etika, dan kebijakan perang dalam Islam awal membentuk satu kesatuan visi peradaban yang utuh.

Meski demikian, tulisan ini masih memiliki keterbatasan. Analisisnya bersifat kualitatif-deskriptif dan belum dilengkapi data kuantitatif ekonomi, belum membandingkan praktik perbudakan Islam secara sistematis dengan peradaban lain, serta belum menggunakan kerangka teoritik ekonomi politik dan hubungan internasional secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi komparatif lintas peradaban, menggunakan pendekatan interdisipliner, serta mengkaji relevansi visi dagang Nabi Muhammad Saw. bagi krisis etika ekonomi global kontemporer.

BIBLIOGRAPHY

- Alserhan, Baker Ahmad. *The Principles of Islamic Marketing*. New York: Routledge, 2017.
- Awais, Muhammad. "10. Understanding Market Structure in Islamic Framework," in Muhammad Awais, Ali Osman Öztürk, Omar Khalid Bhatti, and Nazima Ellahi (eds.), *The Islamic Economic System: Cultural Context in a Global Economy*. London: Routledge, 2024.
- Azhar, Mufti Mohammad Talha. "Prophet (SAW) and Sahaba's Business Life." *Contemporary Journal of Social Science Review*, Vol. 3, Issue 2 (2025).
- Bruning, Jelle and Said Reza Huseini. "Slavery in Byzantium and the Medieval Islamicate World: Texts and Contexts." *Slavery & Abolition*, Vol. 44, Issue 4 (2023). <https://doi.org/10.1080/0144039X.2023.2264110>.
- Davis, Winston. "Max Weber on Religion and Political Responsibility," *Religion*, Vol. 29, Issue 1 (1999). <https://doi.org/10.1006/reli.1999.0177>.
- Durak, Koray. "The economy of Melitene/Malatya and its role in the Byzantine-Islamic trade (seventh to eleventh centuries)." *Byzantinische Zeitschrift*, Vol. 115, Issue 3 (2022). DOI 10.1515/bz-2022-0005.
- Güçlü, İdris. "Karl Marx and Ralf Dahrendorf: A comparative perspective on class formation and conflict," *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, Vol. 9, Issue2 (2014).
- Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical period, 571-1258 C.E.* Lahore: Islamic Publications, 1998.
- Hirshleifer, Jack. *The Dark Side of the Force: Economic Foundations of Conflict Theory*. Camrbidge, UK : The Press Syndicate of the University of Cambridge, 2001.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. Hampshire and London: Macmillan Education Ltd, 1970.
- Koehler, Benedikt. *Early Islam and the Birth of Capitalism*. Maryland: Lexington Books, 2014.

Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 2, No. 10 2025

Kopanski, Ataullah Bogdan. "The Nazarean Legacy: Religious Conflict in Pre-Islamic Arabia as Seen through Crew-Roman Eyes," *American Journal of Islam and Society*, Vol. 15, Issue 2 (1998). <https://doi.org/10.35632/ajis.v15i2.2194>.

Lee, Jeanna. "The Weight of Silk: An Exploratory Account into the Developing Relations between Byzantium and China." *History in the Making*, Vol. 14, Issue 1, article 4, (2021). <https://scholarworks.lib.csusb.edu/history-in-the-making/vol14/iss1/4>.

Mitter, Ulrike. "Unconditional Manumission of Slaves in EARLY ISLAMIC LAW: a Hadīth Analysis," *Der Islam*, Vol. 78, Issue 1 (2001). <https://doi.org/10.1515/islm.2001.78.1.35>.

Nu'mānī, Shīblī. *Omar the Great: The Second Caliph of Islam*, Volume 2. Lahore: Sh. M. Ashraf, 1962.

Nurhadi. "The Tube Hadis Study About Monopoly In Business Economy," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, Vol. 2, Issue 4 (2018). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i04.348>.

Oikonomidès, Nicolas. "Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarioi." *Dumbarton Oaks Papers*, Vol. 40, (1986). <https://doi.org/10.2307/1291528>.

Paracha, Kalsoom and Iqra Arif. "An Overview of the Islamic Trade System and its Various Types," *Annals of Social Sciences and Perspective*, Vol. 6, Issue 2 (2025). <https://doi.org/10.52700/assap.v6i2.468>.

Peters, F. E. *Muhammad and the Origins of Islam*. Albany, New York: State University of New York Press, 1994.

Ridley, Yvonne. *The Rise of the Prophet Muhammad: Don't Shoot the Messenger*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019.

Ruggles, D. Fairchild. *Islamic Environments: Water, Land, Plants, and Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.

Şallābī, 'Alī Muḥammad Muḥammad. *The Noble Life of the Prophet*, Volume 3. Riyad: Darussalam, 2005.

Widodo, Aditya Pratama. "In the Middle Kingdom: A Historical Survey on the Arabs and Persians' Ventures in China, 600s–1300s," *IJUM: Journal of Religion and Civilisational Studies*, Vol. 7, Issue 1 (2024). <https://journals.ijum.edu.my/irkh/index.php/ijrcs/article/view/332>.

Wiseman, Herbert Victor. *Political Systems: Some Sociological Approaches*. London: Routledge, 2024.

Zaman, S. M. Hasanuz. *Trade in Islam: Principles and Practices*. India: Umma Publishing House, 1970.

ابن حبان, السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان, بيروت: المكتب الإسلامي, سنة 2000 .

Aqlam: Jorunal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 2, No. 10 2025

أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الإسلامي بالولاء، المدني، الواقدي، تاريخ مدينة دمشق - بيروت: دار الفكر، 1995 .

سيد محمد السيد، البصرة ذات الوشاحين (التاريخ والسياسة والثقافة)، القاهرة: مكتبة الأدب للطباعة والنشر والتوزيع، 2006

عبد السلام بن محسن آل عيسى، دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه، رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

غزوة شهاب احمد و مهدي عبد الحميد، "العلاقات بين دولة المدينة وبلاد الشام في عصر الرسول صلى الله عليه و سلم"، سرى من رأى، المجلد 9 العدد 34 سنة 2013.

محمد عبد الحفيظ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، الترتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلمية، دار الأرقام - بيروت، الطبعة الثانية. ١٤٣١ .

ممدوح جاد احمد، مختصر السرور في سيرة الرسول، The Writer Operation, 2021 .